

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

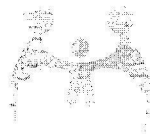
KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEWAWANCARA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
- b. bahwa salah satu tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu seleksi kompetensi bidang berupa wawancara;
- c. bahwa untuk melaksanakan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Pewawancara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pewawancara Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PEWAWANCARA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pewawancara Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Ketentuan mengenai keanggotaan Tim Pewawancara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- terdiri atas 2 (dua) orang anggota untuk setiap formasi jabatan; dan
 - dalam hal anggota nomor urut 1) berhalangan hadir, digantikan oleh nomor urut 2) sebagai pewawancara pengganti sehingga tidak ada kekosongan pewawancara.
- KETIGA : Tim Pewawancara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan wawancara Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tahapan dalam Seleksi Kompetensi Bidang Tahun 2019 dengan:
- berpedoman pada Panduan Seleksi Kompetensi Bidang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019; dan
 - berkoordinasi dengan Tim Pewawancara dari PT ARA Indonesia.
- KEEMPAT : Wawancara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dengan metode dalam jaringan (daring).
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEWAWANCARA SELEKSI KOMPETENSI
BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019

TIM PEWAWANCARA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019

NO	NOMOR URUT/NAMA/JABATAN	FORMASI JABATAN CPNS YANG DIWAWANCARA
1.	1) Ambarwati (Kepala Biro Umum dan SDM) 2) Prita Ismayani Sri Widyarti (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana)	Ahli Pertama - Analis Kebijakan pada Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan SDM
2.	1) Ambarwati (Kepala Biro Umum dan SDM) 2) Prita Ismayani Sri Widyarti (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana)	Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pada Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan SDM
3.	1) Ambarwati (Kepala Biro Umum dan SDM) 2) Frangky Tilung (Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga)	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Rumah Tangga, Biro Umum dan SDM
4.	1) Ambarwati (Kepala Biro Umum dan SDM) 2) Dian Rahmawati (Kepala Bagian Pengembangan SDM)	Analis Kinerja pada Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian, Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM
5.	1) Ambarwati (Kepala Biro Umum dan SDM) 2) Dwi Jalu Atmanto (Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha)	Pelaksana/Terampil - Arsiparis pada Subbagian Tata Usaha, Bagian Keuangan dan Tata Usaha, Biro Umum dan SDM
6.	1) Ambarwati (Kepala Biro Umum dan SDM)	Pelaksana/Terampil - Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NOMOR URUT/NAMA/JABATAN	FORMASI JABATAN CPNS YANG DIWAWANCARA
	2) Dwi Jalu Atmanto (Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha)	Negara pada Subbagian Keuangan, Bagian Keuangan dan Tata Usaha, Biro Umum dan SDM
7.	1) Fakih Usman (Kepala Biro Perencanaan dan Data) 2) Dwi Budi Prasetyo (Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran)	Ahli Pertama - Perencana pada Subbagian Penyusunan Program, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Data
8.	1) Fakih Usman (Kepala Biro Perencanaan dan Data) 2) Sylvianti Angraini (Kepala Bagian Data)	Ahli Pertama - Pranata Komputer pada Subbagian Sistem Informasi, Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data
9.	1) Fakih Usman (Kepala Biro Perencanaan dan Data) 2) Nani Dwi Wahyuni (Kepala Bagian Kerjasama)	Ahli Pertama - Penerjemah pada Subbagian Kerjasama Luar Negeri, Bagian Kerjasama, Biro Perencanaan dan Data
10.	1) Fakih Usman (Kepala Biro Perencanaan dan Data) 2) Sylvianti Angraini (Kepala Bagian Data)	Ahli Pertama - Statistisi pada Subbagian Pengolahan Data, Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data
11.	1) Fatahillah (Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas) 2) Frangky Tilung (Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat)	Konselor pada Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Pengaduan, Bagian Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Humas
12.	1) Fatahillah (Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas) 2) Frangky Tilung (Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat)	Ahli Pertama - Psikolog Klinis pada Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Pengaduan, Bagian Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Humas
13.	1) Fatahillah (Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas) 2) Chrystianto Budi Mulyono (Kepala Bagian Humas dan Protokol)	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat pada Subbagian Informasi dan Peliputan, Bagian Humas dan Protokol, Biro Hukum dan Humas
14.	1) Destri Handayani (Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang)	Ahli Pertama - Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deputi Bidang



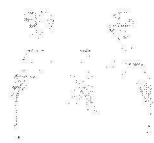


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NOMOR URUT/NAMA/JABATAN	FORMASI JABATAN CPNS YANG DIWAWANCARA
	2) Margareth Robin Korwa (Kepala Bidang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)	Perlindungan Hak Perempuan
15.	1) Destri Handayani (Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang) 2) Margareth Robin Korwa (Kepala Bidang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)	Analisis Perlindungan Perempuan pada Subbidang Pemberdayaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bidang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
16.	1) Destri Handayani (Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang) 2) Hendarmi (Kepala Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang)	Analisis Perlindungan Perempuan pada Subbidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Luar Negeri, Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
17.	1) Prijadi Santoso (Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan) 2) Sri Murni (Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan)	Penyusunan Rancangan Perundang-undangan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
18.	1) Dewi Respatiningsih (Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender) 2) Didik Agus Setiawan (Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender)	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Kesetaraan Gender





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NOMOR URUT/NAMA/JABATAN	FORMASI JABATAN CPNS YANG DIWAWANCARA
19.	1) Dermawan (Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak) 2) Ferdy Ferdiansyah (Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak)	Analisis Perencanaan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak
20.	1) Elita (Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 2) Atjeu Janestri (Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia)	Ahli Pertama - Pranata Komputer pada Subbagian Perencanaan dan Data, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
21.	1) Elita (Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 2) Atjeu Janestri (Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia)	Pelaksana/Terampil - Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Subbagian Keuangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY

